

Analysis of the Financial Performance of the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) of North Sumatra Province

Analisis Kinerja Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Utara

Sahnila Sikumbang¹⁾ ; Marliyah²⁾

^{1,2)} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹⁾ Sahnilasikumbang1@gmail.com; ²⁾ Marlivah@uinsu.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [2 Oktober 2022]

Revised [23 Oktober 2022]

Accepted [12 November 2022]

KEYWORDS

Financial Performance, spending compatibility ratio, efficiency, effectiveness, and variance.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Utara merupakan lembaga teknis daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota melalui sekretariat daerah. Penelitian ini bert ujuan untuk menilai kinerja keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Utara selama lima tahun anggaran. Dalam pengukuran kinerja keuangan ini lebih terfokus kepada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Pengukuran kinerja keuangan ini dilakukan untuk mengetahui penyerapan anggaran dan penggunaan anggaran yang dilakukan selama lima tahun anggaran pada kegiatan-kegiatan yang ada pada instansi itu sendiri. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi.

ABSTRACT

The North Sumatra Province Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) of North Sumatra Province is a regional technical institution in the field of regional development planning led by a head of agency who is under and responsible to the Governor/Regent/Mayor through the regional secretariat. This study aims to assess the financial performance of Bappeda North Sumatra Province for five fiscal years. In measuring financial performance, this is more focused on the Budget Realization Report (LRA). This financial performance measurement is carried out to determine the absorption of the budget and the use of the budget carried out for five budget years in the activities that exist in the agency itself. This research uses a qualitative approach with data collection techniques in the form of documentation.

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdaya Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan media untuk menyampaikan informasi sampai sejauh mana Instansi Pemerintah, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Bappeda) melaksanakan rencana strategi dan memenuhi tuntutan perubahan yang ada di masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang salah satunya adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Bappeda adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota melalui sekretariat daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Gubernur/Bupati/Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dibentuk berdasarkan kebutuhan, perkembangan dan kemajuan di bidang pemerintah, dalam rangka membantu pemerintah daerah melaksanakan pembangunan, khususnya di bidang pemerintahan, dalam hal ini kesemua aspek yang ada dalam proses pengambilan keputusan dalam proses dan pedoman pembentukan penyusunan anggaran dan belanja daerah agar terlaksana.

Dalam pengukuran kinerja keuangan pada Bappeda ini lebih terfokuskan kepada perhitungan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang ada pada Bappeda dengan cara menggunakan beberapa perhitungan analisis rasio, dimana perhitungan rasio pada pemerintahan tidak lah sama dengan perhitungan analisis rasio yang ada pada instansi- instansi perusahaan. Dalam hal ini sangatlah penting bagi Bappeda dalam melakukan berbagai penetapan analisis dalam penggunaan anggaran dan juga belanja yang ada pada instansinya. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 pasal 1, menyebutkan bahwa laporan kinerja adalah ikhtisar yang menyebutkan secara ringkas dan lengkap tentang capaian

kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam pelaksanaan AP BD, kemudian dalam peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015, menyebutkan laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran.

Sedangkan pengukuran kinerja keuangan merupakan salah satu cara menunjukkan akuntabilitas, maksudnya adalah bagaimana cara pemerintah daerah khususnya Bappeda memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas atau kegiatan yang telah tersusun di anggaran. Upaya meningkatkan kinerja seharusnya diiringi dengan pengukuran kinerja yang baik.

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan perbandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pada Bappeda Provinsi Sumatera Utara pada periode berikutnya. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Utara sebagai pihak yang diserahi tugas untuk menjalankan roda pemerintahan dalam perencanaan pembangunan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah Bappeda dapat menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, yaitu: *pertama*, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah yang berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor Publik dalam pemberian pelayanan publik. *Kedua*, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. *Ketiga*, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.

Dalam instansi pemerintahan pengukuran kinerja keuangan tidak dapat diukur dengan rasio-rasio yang biasa didapatkan dari sebuah laporan keuangan dalam suatu perusahaan seperti, *Return of Investment*. Hal ini disebabkan karena sebenarnya dalam kinerja pemerintah tidak ada "*Net Profit*". Karena pemerintah daerah tidak memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan atau laba, meskipun ada istilah surplus atau defisit pendapatan dan belanja pada anggaran pemerintah daerah.

Penggunaan rasio keuangan pada organisasi sektor publik, khususnya pemerintah daerah belum banyak dilakukan, tidak seperti pada lembaga perusahaan yang sudah sering dilakukan. Hal tersebut dikarenakan: keterbatasan penyajian laporan keuangan pada organisasi pemerintah daerah yang sifat dan cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh organisasi yang bersifat komersial. Penilaian keberhasilan APBD sebagai penilaian pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah lebih ditekankan pada pencapaian target, sehingga kurang memperhatikan perubahan yang terjadi pada komposisi atau struktur APBD. Dan sebagian masih dilakukan berdasarkan perimbangan *Incremental budget* yaitu besarnya masing-masing komponen pendapatan dan pengeluaran dihitung dengan meningkatkan sejumlah persentase tertentu, oleh karena itu sering mengabaikan rasio keuangan dalam APBD. Penilaian keberhasilan APBD sebagai penilaian pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah, lebih ditekankan pada pencapaian target, sehingga kurang memperhatikan bagaimana perubahan yang terjadi pada komposisi atau pun struktur APBD nya.

Pengukuran kinerja keuangan ini dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang ada pada Bappeda dengan menggunakan beberapa analisis rasio keuangan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan pelaksanaan anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran juga merupakan laporan yang menyajikan perhitungan atas pelaksanaan dari semua yang telah digambarkan dalam tahun anggaran tertentu. Pada dasarnya laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu tahun anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan pemerintah daerah memberikan informasi yang bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menjadi salah satu laporan pertanggung jawaban keuangan daerah yang utama, karena anggaran merupakan tulang punggung penyelenggaraan pemerintah. Anggaran merupakan alat penting sebagai perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Dengan anggaran manajemen dapat menentukan efektivitas dan efisiensi suatu operasi dengan membandingkan antara anggaran dengan hasil aktual (realisasi terkini) yang dicapai.

Untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah berupa angka efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Maka pengukuran kinerja anggaran lainnya dapat dilihat dengan menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi belanja. Pengukuran kinerja anggaran yang difungsikan untuk menunjukkan produktivitas dan efektivitas belanja daerah yang digunakan oleh

instansi. Efisiensi merupakan perbandingan output dan input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Maka dalam melakukan pengukuran kinerja yang dilakukan oleh instansi pemerintah, pedoman yang digunakan adalah Kemendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 karena peraturan tersebut mengukur kinerja pemerintah dari segi keuangan. Pengukuran kinerja keuangan lainnya juga dapat dilihat dengan menggunakan Analisis Keserasian Belanja, salah satunya adalah dengan menilai rasio belanja langsung dan tidak langsung terhadap total belanja dan rasio pegawai terhadap total belanja. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui keseimbangan antara belanja yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan dananya pada belanja secara optimal. Dan analisis yang digunakan juga untuk mengukur kinerja keuangannya adalah dengan menggunakan analisis varians belanja dan juga pertumbuhan belanja. Dimana analisis varians belanja itu digunakan untuk melihat sejauh mana keefektifan dan penyerapan anggaran untuk aktivitas instansi selama satu tahun anggaran, sedangkan analisis pertumbuhan belanja digunakan untuk mengetahui seberapa besar anggaran dan realisasi terwujud dalam suatu instansi dapat dilihat seberapa jauh pemenuhan pada belanja kegiatan yang digunakan oleh instansi.

Laporan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020

Tahun	Anggaran	Realisasi
2016	27.912.880.489	25.351.103.508
2017	26.390.286.910	22.277.486.322
2018	28.248.164.495	25.423.923.159
2019	28.053.885.700	24.674.341.241
2020	27.132.037.700	25.105.229.859

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dalam tiap tahun penggunaan anggaran pada instansi khususnya Bappeda Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi dapat dikatakan pasang surut atau tidak tetap. Selalu ada perubahan yang menarik ketika kita melakukan analisis. Dalam hal ini perubahan dan pertumbuhan dari pengguna anggaran merupakan salah satu aspek penting dalam penilaian kinerja keuangan yang ada pada instansi.

Peningkatan jumlah anggaran dan anggaran yang terealisasi terjadi pada tahun 2014 sebesar Rp 28.248.164.495 dan Rp 25.423.923.159. Dari tabel diatas dapat dilihat peningkatan dan penurunan realisasi anggaran setiap tahunnya. Sedangkan untuk anggaran belanja operasional terjadi peningkatan pada tahun 6 2014 yaitu sebesar Rp 27.646.164.495, dan untuk belanja modal jumlah anggarannya meningkat pada tahun 2016 sebesar Rp 1.310.840.000.

Jumlah anggaran pada tahun 2016 sebesar Rp27.912.880.489, dengan jumlah belanja yang terealisasi sebesar Rp25.351.103.508 merupakan belanja yang berasal dari belanja operasi dan belanja modal.

Jumlah anggaran pada tahun 2017 sebesar Rp26.390.286.910, dengan jumlah belanja yang terealisasi sebesar Rp22.277.486.322 merupakan belanja yang berasal dari belanja operasi dan belanja modal.

Jumlah anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp28.248.164.495, dengan jumlah belanja yang terealisasi Rp25.423.923.159 merupakan belanja yang berasal dari belanja operasi dan belanja modal.

Jumlah anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp28.053.885.700, dengan jumlah belanja yang terealisasi Rp24.674.341.241 merupakan belanja yang berasal dari belanja operasi dan belanja modal.

Jumlah anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp27.132.037.700, dengan jumlah belanja yang terealisasi Rp25.105.229.859 merupakan belanja yang berasal dari belanja operasi dan belanja modal.

Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomis, akuntabilitas, dan ketaatan pemerintah daerah terhadap anggaran. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini akan berupaya sebaik mungkin untuk menyesuaikan adanya perubahan-perubahan kondisi dan pengembangan dalam penyusunan anggaran. karena terdapat beberapa hambatan yang menjadi sistem dari penyusunan kinerja keuangan Bappeda seperti kurang efektif dan efisiennya dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran karena terkadang yang menjadi acuan penganggaran ada yang belum bisa dikelola. Dari uraian diatas terlihat bahwa anggaran memegang peranan penting sebagai alat perencanaan dan pengawasan. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Kinerja Keuangan Badan Perencanaan 7pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020".

LANDASAN TEORI

Teori pada dasarnya merupakan suatu tahapan untuk membedah dan juga menganalisis persoalan tema penelitian, sehingga bisa lebih jelas obyek dan ruang lingkup kajiannya. Adapun beberapa kajian dan teori yang bisa dijelaskan dalam penelitian ini, antara lain:

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

1. Pengertian Analisis

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya), penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Analisis berasal dari kata Yunani "Analisis" yang berarti melepaskan. Analisis dari dua suku kata yaitu "Ana" yang berarti kembali dan "Luein" yang berarti melepas. Sehingga pengertian analisis yaitu suatu usaha untuk mengamati secara detail pada suatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut.

Secara umum, pengertian analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu pokok menjadi bagian-bagian atau komponen sehingga dapat diketahui ciri atau tanda tiap bagian, kemudian hubungannya antara satu dengan yang lain serta fungsi masing-masing dari setiap bagian.

Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan utama untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa mendatang.

Analisis laporan keuangan digunakan untuk mencapai beberapa tujuan. Misalnya, digunakan sebagai alat screening awal dalam memilih alternatif investasi mengenai kondisi dan kinerja keuangan di masa yang akan datang, sebagai proses diagnosa terhadap masalah-masalah manajemen, operasi, atau masalah lainnya.

2. Pengertian Kinerja

Kinerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah melakukan sesuatu, sesuatu yang dilakukan. Kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh indikator-indikator suatu pekerjaan dalam kurun waktu tertentu.

Kinerja merupakan hasil kerja yang di capai seseorang atau pegawai yang menghasilkan output, efisien, efektivitas yang berkaitan dengan produktivitas secara kualitas maupun kuantitas sesuai yang dipertanggungjawabkan.

Dapat diartikan juga kinerja merupakan hasil keberhasilan seseorang atau kelompok individu dalam melakukan sebuah kegiatan atau pekerjaan yang dapat menghasilkan berupa output atau tingkah laku dalam suatu periode dalam mencapai tujuan individu atau kelompok di sebuah instansi atau organisasi.

Kinerja juga merupakan sebuah penilaian oleh atasan dalam menilai kemampuan bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Kinerja juga dapat dipakai dalam penilaian sebuah tingkah laku individu pada pelaksanaan tugasnya atau tingkah laku terhadap tanggungjawab tugas yang diberikan.

Menurut S udarmanto, kinerja merupakan catatan hasil yang di produksi atau fungsi pekerjaan tertentu atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Sebagai perilaku kinerja juga merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi tempat orang bekerja.

3. Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasan didalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batasan-batasan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

kinerja keuangan pemerintah daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kualitas dan kuantitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran



dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran.

4. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap keuangan pemerintah yang menyangkut data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan pada suatu periode tertentu, ataupun usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam rangka pengolaan pemerintah daerah yang transparan, jujur, demokrasi, efektif, dan akuntabel, analisis kinerja keuangan daerah perlu dilakukan dengan menggunakan salah satu ukuran yaitu analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Belanja Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan adalah produk manajemen dalam pertanggung jawaban penggunaan sumber daya dan sumber dana yang dipercayakan kepadanya. Secara umum, laporan ini menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas dalam satu periode. Dalam konteks daerah, laporan ini ditujukan bagi pengguna laporan di luar pemerintah daerah untuk menilai dan mengambil keputusan. Disini, sumber informasi adalah pemerintah daerah yang bersangkutan. Materi di dalamnya adalah kegiatan pemerintah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan. Fungsi laporan keuangan adalah sebagai alat komunikasi informasi keuangan kepada para pemakai. Standar umum pelaporan keuangan tersebut merupakan pedoman penyajian informasi dalam laporan keuangan untuk memenuhi fungsi tersebut.

Laporan keuangan tersebut berisi ringkasan dari suatu proses pencatatan, transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Ukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah strategis, sasaran strategis, inisiatif strategis dan implementasi mampu memberikan kontribusi dalam menghasilkan keuntungan bagi masing-masing instansi, oleh karena itu laporan keuangan sangat penting karena merupakan produk atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi.

Organisasi Sektor Publik Pengertian Organisasi

Organisasi mempunyai dua pengertian umum. Pengertian pertama menandakan suatu lembaga atau kelompok fungsional, seperti organisasi perusahaan, rumah sakit, perwakilan pemerintah. Pengertian kedua berkenaan dengan proses pengorganisasian, sebagai suatu cara dimana kegiatan organisasi dialokasikan dan ditugaskan diantara para anggotanya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisiensi.

Organisasi merupakan alat yang digunakan oleh manusia untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengertian lain dari organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu.

Salah satu ciri utama dari suatu organisasi adalah adanya sekelompok orang yang menggabungkan diri dengan suatu ikatan norma, peraturan, ketentuan dan kebijakan yang telah dirumuskan dan masing-masing pihak siap untuk menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Ciri yang kedua adalah bahwa dalam suatu organisasi yang terdiri atas sekelompok orang tersebut saling mengadakan hubungan timbal balik, saling memberi dan menerima, dan juga saling bekerja sama untuk melahirkan dan merealisasikan maksud, sasaran, dan tujuan. Ciri yang ketiga adalah bahwa dalam suatu organisasi yang terdiri atas sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerja sama tersebut diarahkan pada suatu titik tertentu, yaitu tujuan bersama dan ingin direalisasikan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan data yang ada dan menjelaskan data dengan kalimat penjelasan secara kualitatif. Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data yang dapat memberikan gambaran yang jelas atas objek yang diteliti, untuk kemudian di proses dan di analisis lalu ditarik kesimpulannya. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis kinerja keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Utara tahun 2016-2020, data dalam penelitian ini berupa data Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2016-2020.

Lokasi dan Waktu Penelitian**Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Utara yang berlokasi di Jalan Ponegoro No. 21-A.

Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari – Februari 2022.

Subjek dan Objek Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dimaksudkan agar hasil penelitian dan pembahasan pada jurnal ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada. Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian yaitu Kepala Bidang Keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Utara. Objek penelitian yang menjadi pusat penelitian ini adalah Analisis Kinerja Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan melihat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) selama lima tahun Anggaran dari tahun 2016-2020.

Jenis dan Sumber Data

Data untuk suatu penelitian dapat dikumpulkan dari berbagai sumber. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. data sekunder yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Utara tahun 2016-2020. Sumber data yang digunakan berasal dari kantor Bappeda Provinsi Sumatera Utara.

Analisis Data

Teknik analisis data dengan metode deskriptif kualitatif adalah metode dengan mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang sudah didapatkan di lapangan dengan melakukan penjelajahan, kemudian dilakukan pengumpulan data sampai mendalam, mulai dari observasi hingga penyusunan laporan. berdasarkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang didasarkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

HASIL DAN PEMBAHASAN**Analisis Keserasian Belanja**

Merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui keseimbangan antara semua belanja yang ada terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilisasi. Untuk mengetahui keserasian belanja pemerintah daerah dapat menggunakan analisis ini, dalam total belanja jika belanja tidak langsung lebih besar dari pada belanja langsung maka dianggap tidak baik. Jika belanja pegawai > 50% dalam total belanja, maka dapat dikatakan anggaran belanja tidak baik. Demikian pula sebaliknya.

Keserasian belanja diklarifikasikan menjadi dua yaitu, belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung terdiri atas belanja barang dan jasa dan belanja modal. Sementara belanja tidak langsung terdiri atas belanja pegawai yang berisi gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil.

Analisis ini dapat dihitung dengan:

Analisis Belanja Langsung terhadap Total Belanja

Menginformasikan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja langsung yang digunakan oleh instansi. Kriteria analisis keserasian belanja adalah sebagai berikut:

1. Baik : Belanja Langsung > Belanja Tidak Langsung
2. Tidak Baik : Belanja Langsung < Belanja Tidak Langsung

Tabel 1. Rekapitulasi Anggaran Belanja Daerah Bappeda Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Anggaran	Realisasi	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung
2016	27.912.476.015	25.351.103.508	13.211.357.708	12.139.745.800
2017	26.390.286.910	22.277.486.322	11.283.471.322	10.994.015.000
2018	28.248.164.495	25.423.923.159	13.085.490.309	12.338.432.850
2019	28.053.885.700	24.674.341.241	13.241.388.780	11.432.952.461
2020	27.132.037.700	25.105.229.859	10.933.359.095	14.171.870.764

Data Perkiraan Anggaran BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara

Perhitungan dengan rumus Analisis Keserasian Belanja dengan berdasarkan pada tabel 1 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 2. Analisis Keserasian Belanja

Tahun Anggaran	Total Belanja Langsung	Total Belanja	Rasio (%)
2016	12.139.745.800	25.351.103.508	48%
2017	10.994.015.000	22.277.486.322	49%
2018	12.338.432.850	25.423.923.159	49%
2019	11.432.952.461	24.674.341.241	46%
2020	14.171.870.764	25.105.229.859	56%
Total	61.077.016.875	122.832.084.089	49%

Data Hasil Olahan

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Analisis Keserasian Belanja jika dilihat dari Belanja Langsung terjadi kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Kenaikan Belanja Langsung Terhadap Total Belanja terjadi pada tahun 2020 dengan mencapai tingkat persentase tertinggi yaitu 56%, sedangkan penurunan Belanja Lansung Terhadap Total Belanja terjadi pada tahun 2019 dengan tingkat persentase terendah yaitu sebesar 46%. Di tahun 2020 Analisis Belanja Langsung yang ditunjukkan pada hasil analisis menunjukkan pada angka persentase sebesar 48% dari total anggaran Rp. 25. 351.103.508, pada tahun 2017 menunjukka n angka persentase sebesar 49% dari total anggaran Rp.22.277.486.322, pada tahun 2014 menunjukkan angka persentase sebesar 49% dari total anggaran Rp. 25.423.923.159, pada tahun 2019 menunjukkan angka persentase sebesar 46% dengan total anggaran Rp. 24.674.341.241, dan pada tahun 2020 menunjukkan angka persentase sebesar 56% dengan total anggaran sebesar Rp. 25.105.229.859. Total keseluruhan belanja langsu ng adalah 49%.

Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pertumbuhan realisasi anggaran belanja selama periode penggunaan anggaran dari tahun ke tahun apakah bersifat positif atau negatif dalam penggunaan anggaran yang ada pada instansi untuk membiayai semua kegiatan-kegiatannya. Kriteria pertumbuhan belanja adalah sebagai berikut:

- a. Naik : Positif
- b. Turun : Negatif

Perhitungan dengan menggunakan rumus pertumbuhan belanja dengan berdasarkan tabel 2., maka di dapat kesimpulan sebagai berikut:

Tabel 3. Analisis Pertumbuhan Belanja Tahun Anggaran 2016-2020

Uraian	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	Total
Realisasi Belanja	23.838.350.166	22.277.486.322	25.423.923.159	24.674.341.241	96.214.100.888
Realisasi Belanja	22.277.486.322	25.423.923.159	24.674.341.241	25.105.229.859	97.480.980.581
Kenaikan/ Penurunan	(1.560.863.844)	3.146.436.837	(749.581.918)	430.888.618	1.266.879.693
%	(7%)	14%	(3%)	2%	1%

Data Hasil Olahan

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan anggaran belanja mengalami penurunan dan bernilai negatif karena pertumbuhan belanja pada tahun ini mengalami pengurangan sebesar Rp. 1.560.863.844, dengan persentase bernilai negatif sebesar 7% dari Pagu Anggaran yang tersedia pada realisasi belanja di tahun 2016 dan 2017.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan anggaran belanja dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 mengalami kenaikan dan bernilai positif karena pertumbuhan belanja pada tahun ini mengalami penambahan sebesar Rp. 3.146.436.837, dengan persentase sebesar 14%.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan anggaran belanja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 kembali mengalami kenaikan dan bernilai positif. Dengan di tunjukkannya angka persentase sebesar 2% dan terjadi penambahan pertumbuhan anggaran sebesar Rp. 430.888.618. Dapat dikatakan bahwa Bappeda Provinsi Sumatera Utara selama lima tahun anggaran mengalami kenaikan dan penurunan terhadap pertumbuhan belanja, dapat dilihat dari pertambahan dan pengurangan jumlah anggaran. jika dilihat dari total keseluruhannya mengalami pertumbuhan sebesar 1% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.266.879.6

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kinerja Keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Utara di lihat dari keserasian belanja, secara umum terlihat bahwa sebagian besar dana belanja daerah di alokasikan untuk belanja tidak langsung, dan sisanya dialokasikan untuk belanja langsung. Selama lima tahun anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Utara dinilai tidak baik dalam penggunaan anggarannya yaitu pada tahun 2016 sampai dengan 2019, karena selama empat tahun ini Bappeda Provinsi Sumatera Utara lebih terfokus terhadap pembiayaan belanja tidak langsung. Sementara pada tahun 2020 Bappeda dikatakan baik dalam penggunaan anggarannya dengan melakukan penghematan terhadap belanja tidak langsung.
2. Kinerja Keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Utara di lihat dari analisis pertumbuhan belanja, bahwa pada analisis ini pertumbuhan belanja dari tahun 2016-2020 terus mengalami perubahan. Masing-masing anggaran memiliki tingkat penyerapan anggarannya sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas kegiatan pembangunan. Penilaian kinerja keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Utara secara umum menunjukkan pertumbuhan yang positif dan pemanfaatan belanja sudah dilakukan secara efisien. Dengan rata-rata pertumbuhan yaitu 1% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.266.879.693.
3. Kinerja keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Utara dilihat dari analisis efektivitas belanjanya selama lima tahun dari tahun 2016-2020 sudah cukup efektif. Dapat dilihat dari rata-rata perhitungannya adalah sebesar 89%, hal ini masih diatas 80%.
4. Kinerja keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Utara dilihat dari analisis efisiensi belanja daerah, bahwa realisasi anggaran belanja Bappeda tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja. Hal ini menunjukkan bahwa 81 Bappeda Provinsi Sumatera Utara telah melakukan efisiensi belanja . dapat dilihat dari rata-rata perhitungannya yaitu sebesar 34%. Hal ini menunjukkan bahwa Bappeda Provinsi Sumatera Utara telah melakukan penghematan anggaran selama lima tahun. Ini ditunjukkan dengan tidak adanya angka diatas 60%.
5. Kinerja keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Utara di lihat dari varians belanja dari tahun 2016-2020 secara umum dapat dikatakan baik. Hal ini di tunjukkan dengan rata-rata target realisasi sebesar 89%. Hal ini di tunjukkan dengan tidak adanya realisasi belanja yang melebihi anggaran belanja.

DAFTAR PUSTAKA

- Marja Sinurat, Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua (Bandung,Pustaka Rahmat,2015),h.121
Perpustakaan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang: Widya Karya,2010, h.34
Arfan Ikhs an dkk, Analisis Laporan Keuanga , (Medan: Madanetra, 2012), h. 43
Wirawan, Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Sa le mba Empat, 2009), H.5
Sudarmanto, Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009, h. 8
Dedi Nordia wan, et, Akuntansi Sektor Publik , (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 157-159
Syafriza I, Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonom, (Jakarta: Rajawali,2014), h. 52-55
Ibnu Syamsi,Pokok-Pokok Kebijak sanaan, Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran pembangunan Tingk at Nasional dan Regional , (Jakarta: CV Ra jawa li, 2013), h.199
Hendra Sumario,Pengaruh Karakteristik Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah,(Yogyakarta:Graha Ilmu,2010),h.55
Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, (Yogyakarta: Andi, 2002), h.121
Mahmudi, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, h. 6
Abdul Hafiz Tanjung, Ak untansi Pemerintah Daerah, Konsep dan Aplikasi, (Bandung: Alfabet, 2006), h. 196
Sunarji Harahap, Pengantar Manajemen, (Medan, 2016), h. 74
Ernie Tisnawati Sule,dkk, Pengantar Manajemen, (Ja karta : Prenada Media Grup, 2010), h. 50
Sis wanto, Pengantar Manajemen, (Jaka rta: PT Bu mi Aks ara, 2011) h. 73 - 74
Mulyadi, Perilak u Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan, ct. 1, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 11
Hanggreni, Teori Perilaku k eorganisasian , ct. 1, (Yogyakarta : Penerbit Caps , 2015), h.1
Sugiyono,Metode Penelitian Bisnis,(Bandung:Alfabeta 2002),h.34